

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu entitas pada pemerintahan, laporan keuangan ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dan mesti disampaikan oleh seorang Presiden dan Gubernur (Fidhotuzahra, 2020). Hal ini berarti, hasil dari laporan keuangan tersebut akan dilakukan pengauditan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni suatu badan negara yang memiliki suatu tugas dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan negara. Hasil Pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada DPR/DPRD dan DPD serta disampaikan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kinerja pada pemerintah yang baik tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu perusahaan tersebut. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan harus disampaikan tepat waktu dapat dijadikan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintahan sehingga dapat dijadikan sebagai cerminan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik, amanah, serta demokratis. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintahan dalam menjalankan perusahaan tersebut. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang hasil operasi, arus kas, saldo anggaran lebih, realisasi anggaran, posisi keuangan dan

perubahan modal suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Tawaqal, 2017). Tuntutan mengenai akuntabilitas terhadap pelaporan keuangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan meningkatnya suatu pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang memerlukan dan membutuhkan informasi mengenai penggunaan dana publik, sehingga keinginan dan kebutuhan masyarakat dapat disesuaikan dan dijadikan sebagai penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam suatu periode. Akuntabilitas haruslah membutuhkan keikutsertaan masyarakat untuk melahirkan suatu kebijakan publik yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah pada setiap periodenya dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan pemerintahan. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik, maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas terhadap pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan.

Sumber daya manusia yang terampil dan kompeten sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Keterbatasan Pegawai Negeri Sipil dengan pelatihan dan ilmu di bidang akuntansi menjadi kurangnya kompetensi aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola keuangan daerah yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku (Latifah, 2017). Penerapan suatu sistem akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku, tentu menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan

akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Fauziyah, 2019). Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur suatu sumber daya manusia yang memiliki kualitas dalam menyusun laporan keuangan adalah faktor pengetahuan, keterampilan dan sikap (Yusnita, 2015). Dengan adanya faktor tersebut tentu saja dapat menciptakan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Namun, berdasarkan observasi pada pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pada Sub Bagian Umum, faktor ketelitian dapat menjadi tolak ukur dari penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk mewujudkan laporan keuangan berkualitas, penerapan sistem akuntansi daerah terus disosialisasikan setiap tahunnya. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) diterapkan oleh pemerintah provinsi dan kota/kabupaten yang memproses data-data semua transaksi keuangan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan (Erni, 2018). Penggunaan SIA diyakini dapat memudahkan pemrosesan data transaksi keuangan yang semakin efisien, efektif dan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Permendagri No. 90/2019 mengharuskan Pemerintah Daerah agar menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kedepannya dalam perencanaan pembangunan daerah. SIPD itu sendiri berupa sistem jaringan yang menghimpun data dan informasi dengan terintegrasi pada pemerintahan sebagai informasi tambahan dalam proses perencanaan dan penilaian pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi. SIPD memang memudahkan karyawan dalam menyusun laporan keuangan, namun penggunaan SIPD diperlukan pemahaman serta keterampilan dalam penggunaannya. Dari banyaknya pegawai sub bagian umum 3 dari 9 orang

belum mampu memahami penggunaan SIPD. Untuk mengatasi ketidakpahaman aparatur negara yang tengah mengalami kesulitan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, berkualitas tinggi dalam menyajikan serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka perlu dilakukan suatu pelatihan dan Pendidikan untuk pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) yakni kompetensi sumber daya manusia ini memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus, berkualitas dan kompeten pula laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memuat pilihan prosedur dan Teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) dapat dihasilkan suatu kesimpulan yakni kualitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriasri dan Abdullah (2017) dan Utama (2017) yang memiliki kesimpulan bahwa pengaruh sistem keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki suatu pengaruh secara positif. Namun, penelitian ini memiliki hasil yang berbeda ketika diteliti oleh Latifah (2017) yang memiliki hasil penelitian pengaruh sistem keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak memiliki suatu pengaruh secara positif.

Di era digital ini, penggunaan teknologi dapat dijadikan sebagai suatu kewajiban untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan pemerintahan. Teknologi adalah salah satu alat untuk membantu sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan dan dapat mengurangi serta meminimalisir tingkat kesalahan yang terjadi pada proses pembuatan laporan keuangan. Selain itu, dengan adanya teknologi, tentu saja dapat menghemat waktu serta biaya yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Sehingga dengan adanya sumber daya manusia dalam proses pembuatan laporan keuangan, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Kualitas laporan keuangan mengacu pada sejauh mana laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang akurat dan benar. Laporan keuangan mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas suatu perusahaan serta merupakan sarana informasi akuntansi untuk menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lainnya. Menurut Bachtaruddin, menyatakan bahwa karakteristik kualitas utama dalam laporan keuangan sehingga informasi tersebut bermanfaat yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan atau dapat dipercaya (*reliability*). Agar relevan, informasi harus mampu mempengaruhi perubahan pada pengambilan keputusan. Kemudian, *reliability* berarti seorang pengguna dapat dipercaya atas informasi yang akan dilaporkan. Informasi akuntansi dianggap andal apabila informasi tersebut benar-benar mewakili apa yang dimaksud dan kebenarannya dapat diuji. Kualitas laporan keuangan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukannya

Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang dikenal sebagai salah satu instansi pemerintahan yang menyediakan jasa layanan public dengan bidangnya masing-masing salah satunya yaitu bidang keuangan yang memiliki fungsi menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran serta melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja yang nantinya dapat berupa laporan keuangan. Dengan adanya hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu :

1. Kurangnya pemahaman karyawan sebagai sumber daya manusia dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas
2. Rendahnya tingkat pelatihan dalam proses penciptaan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan dan untuk lebih memusatkan penelitian yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan nantinya, maka dalam hal ini penulis fokus pada Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yakni : Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan menjadi bahan acuan atau pembanding dengan penelitian sebelumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan pada peneliti untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat pada bangku perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan pada bidang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

b. Bagi Dinas Perhubungan

Bagi staf Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran mengenai penyusunan laporan keuangan yang berkualitas pada suatu entitas pemerintahan.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan bahan bacaan ilmiah dan dapat digunakan sebagai pembandingan bagi mahasiswa lain yang melakukan penelitian mengenai topik kualitas sumber daya manusia yang kompeten terhadap penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

